

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, yaitu apakah terdapat pengaruh implementasi kebijakan e-Tilang terhadap kepercayaan politik masyarakat di bidang keamanan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan e-Tilang berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepercayaan politik masyarakat di bidang keamanan pada pengendara sepeda motor di DKI Jakarta sebagaimana dibuktikan melalui analisis regresi linier sederhana dan uji t. Semakin baik proses e-Tilang dirasakan konsisten dan adil oleh masyarakat, semakin kuat pula pengakuan mereka atas legitimasi Polri sebagai institusi keamanan. Sebaliknya ketika proses tersebut dirasakan menyimpang dari prinsip keadilan prosedural, kepercayaan itu pun berpotensi melemah.

E-Tilang terbukti mengurangi ruang kewenangan sepihak petugas, sumber kecurigaan publik selama ini. Namun keberhasilan kebijakan e-Tilang ini belum menjamin keberlangsungan kepercayaan karena legitimasi tetap rentan tergoyahkan oleh kejanggalan seperti kesalahan identifikasi kendaraan atau keterlambatan konfirmasi yang di era digital dapat cepat mengubah persepsi publik. Kejelasan komunikasi Polri saat menangani keluhan masyarakat menjadi krusial karena hal ini membentuk *trust in motives* keyakinan bahwa e-Tilang dijalankan demi keselamatan bersama bukan kepentingan institusi. Legitimasi terbentuk bukan dari satu kebijakan yang berhasil sesaat melainkan dari konsistensi keadilan prosedural yang dirasakan berulang sebagaimana ditegaskan Tyler & Huo bahwa legitimasi hukum hanya bertahan selama masyarakat merasakan kekuasaan dijalankan secara adil.

Secara teoritis temuan penelitian ini memperkuat relevansi model integrasi antara teori implementasi kebijakan Edward III dan teori keadilan prosedural Tyler & Huo dalam menjelaskan pembentukan kepercayaan politik di sektor keamanan di mana keberhasilan implementasi kebijakan tidak secara langsung menghasilkan kepercayaan politik melainkan bekerja

melalui mekanisme persepsi keadilan prosedural sebagai variabel penghubung menuju legitimasi institusi. Dengan demikian, kepercayaan politik di bidang keamanan terbukti merupakan hasil interaksi antara kualitas implementasi dan persepsi keadilan yang dirasakan masyarakat secara berulang bukan sekadar fungsi dari efektivitas teknis kebijakan semata.

Secara praktis, temuan ini mengindikasikan bahwa Polri perlu memandang keberhasilan e-Tilang tidak hanya dari aspek teknis dan tingkat kepatuhan masyarakat tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut dirasakan adil dan konsisten oleh pengguna jalan melalui penguatan mekanisme konfirmasi dan koreksi kesalahan identifikasi kendaraan, peningkatan transparansi komunikasi publik saat terjadi kejanggalan atau keluhan, standardisasi kecepatan proses tilang elektronik dari deteksi hingga notifikasi serta evaluasi berkala berbasis persepsi masyarakat sebagai indikator keberhasilan kebijakan.

5.2 Saran

Penulis mengakui bahwa studi ini belum sepenuhnya sempurna dan masih terdapat sejumlah keterbatasan. Maka dari itu, ada beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi penelitian yang akan datang, antara lain:

5.2.1 Saran Akademis

Bagi penelitian di masa mendatang, studi mengenai *e-government* dapat dilakukan secara lebih spesifik dengan memfokuskan pada suatu kebijakan tertentu, seperti e-Samsat, SIM online, Coretax, JAKI, atau LAPOR!, sehingga temuan yang dihasilkan lebih relevan secara kontekstual dan rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran bagi para pelaksana. Selain itu, cakupan studi dapat diperluas dengan menggunakan teknik sampling probabilitas tanpa kriteria yang terlalu ketat sehingga hasil yang diperoleh lebih representatif dan dapat digeneralisasikan secara lebih luas. Penelitian selanjutnya juga dapat

mempertimbangkan penggunaan mix methods agar temuan kuantitatif dapat diperkaya dengan perspektif kualitatif yang lebih mendalam, terutama dalam menggali alasan di balik penilaian dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diteliti.

5.2.2 Saran Praktis

1. Kepolisian Republik Indonesia selaku implementor utama kebijakan e-Tilang hendaknya melakukan evaluasi berkala terhadap akurasi sistem, khususnya dalam memastikan bahwa pelanggaran yang tercatat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Hal ini penting agar masyarakat tidak meragukan keadilan sistem dan kepercayaan publik terhadap kebijakan ini tetap terjaga.
2. Kepolisian Republik Indonesia hendaknya membangun mekanisme komunikasi publik yang responsif ketika permasalahan terkait e-Tilang mencuat di masyarakat baik melalui media sosial maupun kanal resmi lainnya. Respons yang cepat dan transparan dapat mencegah keraguan publik berkembang menjadi ketidakpercayaan yang lebih dalam.
3. Masyarakat hendaknya lebih kritis dan tidak serta-merta menerima atau menolak kebijakan yang diterbitkan oleh kepolisian maupun lembaga terkait. Dengan memanfaatkan keterbukaan informasi di era digital, masyarakat dapat secara aktif mengikuti perkembangan implementasi e-Tilang sehingga kepercayaan politik yang diberikan bukan lahir dari ketidaktahuan melainkan dari penilaian yang sadar dan berdasar.